

Evaluasi Program Keluarga Berencana di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi

Emilia Emharis¹, Alsyar Andri², Melliofatria³

Universitas Islam Kuantan Singingi

papaharis@gmail.com¹, alsarandri50@gmail.com², melliofatriahendri@gmail.com³

Article Info

Keywords:

Angka Kemiskinan
Implementasi
KB

This is an open access article under the
[CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



Abstract

Pelaksanaan program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat telah banyak di implementasikan. Namun dari sekian banyaknya program yang telah dibuat tidak semuanya berdampak positif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu penyebab ketidak terlaksananya program pemerintah adalah meningkatnya angka kemiskinan dan meningkatnya jumlah pertumbuhan penduduk terutama di Kabupaten Kuantan Singingi, hal ini tentu dampak dari meningkatnya jumlah kelahiran dan pengangguran. Salah satu program terbaru yang dibuat oleh pemerintah untuk mengurangi angka kelahiran adalah Program Keluarga Berencana yang diperuntukkan masyarakat. Tujuan dari program Keluarga Berencana ini adalah untuk menekan laju pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali. Namun program ini juga mengalami kendala dalam pelaksanaannya diberbagai daerah dan wilayah, salah satunya adalah di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi program Keluarga Berencana di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi dan yang menjadi tujuannya adalah untuk mengetahui implementasi program Program Keluarga Berencana di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Van Metter dan Van Horn tentang implementasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Adapun tempat atau lokasi penelitian yaitu Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi dengan menggunakan metode penelitian yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan, hasil analisa peneliti dan ditambah dengan dokumentasi, maka hasilnya bahwa implementasi Program Keluarga Berencana Di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi sudah cukup terimplementasi.

1. Pendahuluan

Kemiskinan telah membuat jutaan anak tidak bisa mengenyam pendidikan, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan investasi, dan masalah lain yang menjurus ke arah tindakan kekerasan dan kejahatan. Kemiskinan dan pengangguran yang meluas sangat mudah ditemukan di negara-negara yang telah dianggap keberhasilan membangun ekonomi, teknologi dan industri.

Dari tahun ke tahun jumlah penduduk miskin Indonesia selalu meningkat, tidak terkecuali di Provinsi Riau, yang mana pada tahun 2019 saja masyarakat miskin di Provinsi Riau meningkat dari tahun sebelumnya. Seperti yang data yang diberitakan Riau Pos hari Rabu Tanggal 2 Januari 2019 yang memberitakan penduduk miskin di Riau bertambah 4.010 jiwa.

Masalah yang dihadapi beberapa negara berkembang dewasa ini adalah mengurangi jumlah kemiskinan dengan menggunakan berbagai cara baik melalui peningkatkan infrastruktur ekonomi seperti membangun jalan, jembatan, pasar, serta sarana lain, maupun membangun derajat dan partisipasi masyarakat melalui peningkatan pendidikan maupun kesehatan. Namun demikian kendala utama yang dihadapi hampir semuanya sama, yang umumnya bersumber pada permasalahan kependudukan. Mulai dari masih tingginya angka kematian bayi dan ibu melahirkan, rendahnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak reproduksi, serta masih cukup tingginya laju pertumbuhan penduduk, yang tidak sebanding dengan daya dukung lingkungan.

Meskipun secara normative, masalah-masalah kemiskinan, kesehatan, pengangguran, keadilan sosial telah termuat dalam naskah-naskah perencanaan pembangunan nasional, implementasinya masih jauh dari kata memuaskan. Karena itu konsepsi pembangunan sosial dalam konteks pembangunan nasional Indonesia, memberikan kerangka bagi pemerintah untuk lebih memperhatikan aspek-aspek sosial dalam proses pembangunan ekonomi yang lebih dominan pada saat ini.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 15 Tahun 2010 pasal 1 ayat 1 dan 2 yang dimaksud dengan penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.

Sungguh begitu banyak kegiatan yang dilaksanakan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam menangani masalah kemiskinan tersebut. Salah satunya adalah dengan mengurangi angka pertumbuhan penduduk pertahun melalui Program Keluarga Berencana. Keluarga Berencana adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga, untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. Program Keluarga Berencana bertujuan untuk memenuhi permintaan pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi yang berkualitas serta mengendalikan angka kelahiran yang pada akhirnya meningkatkan kualitas penduduk dan mewujudkan keluarga-keluarga kecil berkualitas.

Kebijakan formal tentang peningkatan peran serta pria tentang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi secara jelas baru terlihat semenjak dicanangkannya era baru program KB nasional tahun 2000. Kebijakan program peningkatan peran serta pria masih relatif baru, sehingga penerapan di lapangan masih belum merata. Ada wilayah yang sudah menerapkan kebijakan tersebut, ada yang baru disosialisasikan, ada yang sama sekali belum disentuh. Salah satu sasaran dari sekian banyak sasaran yang akan dicapai oleh program KB dalam jangka panjang demi tercapainya Keluarga Berkualitas 2015, adalah upaya mencapai peningkatan kesertaan pria dalam ber-KB.

2. Tinjauan Pustaka

Secara etimologis, administrasi berasal dari bahasa latin *ad* dan *ministrare*, yang berarti “membantu, melayani dan memenuhi”. Di Indonesia disebut Administrasi dari dua bahasa yang berbeda dengan makna yang berbeda pula. Yaitu, yang pertama *administratie* dari bahasa Belanda, yang berarti tata usaha dalam arti sempit. Kemudian *bestuur*, yaitu manajemen akan kegiatan-kegiatan organisasi. Yang kedua *administration* yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu proses kegiatan usaha kerja sama sekelompok orang secara terorganisasi untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien. Dengan demikian ada beberapa hal yang terdandung dari pengertian administrasi, yaitu, sekelompok orang, kegiatan, kerja sama, tujuan, dan efisien.

Menurut Leonard D.white (dalam Syafiie dkk, 1999:26), administrasi adalah suatu proses yang umum ada pada usaha-usaha kelompok, baik Pemerintah maupun Swasta, baik sipil maupun militer baik dalam ukuran besar maupun kecil. S.P. Siagian (2004:2), administrasi adalah sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan pada rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Siagian (2008:2) dalam buku *Filsafat Administrasi* mengatakan : “Administrasi adalah satu keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Max Webber (dalam Kumorotomo, 2005:82) dengan bukunya “Etika Administrasi Negara” menjelaskan Administrasi berarti penyelenggaraan wewenang dan otoritas. Otoritas disini dapat dimiliki oleh para aparat birokrasi karena mereka telah mendapatkan legitimasi dari rakyat melalui negara. Menurut John M. Pffifner dan Robert V. Presthus (dalam Syafiie, 2009:31), Administrasi

Negara yaitu : Administrasi negara meliputi implementasi kebijaksanaan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik administrasi negara dapat didefinisikan sebagai koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah. Hal ini meliputi pekerjaan sehari-hari pemerintah. Administrasi negara dapat didefinisikan sebagai koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah. Secara ringkas, administrasi negara adalah suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah, pengarahan, kecakapan dan teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang. Edward H. Litchfield dalam *Notes on A General Theory of Administration*, yang dikutip dan diterjemahkan oleh Inu Kencana Syafie dalam bukunya *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia* menyatakan bahwa : “Administrasi negara adalah suatu studi mengenai bagaimana bermacam-macam badan pemerintahan diorganisasi, diperlengkapi dengan tenaga-tenaganya, dibiayai, digerakkan, dan dipimpin”. (Syafie, 2003:33).

Siagian (2006:2) dalam “Filafat Administrasi” Administrasi adalah sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa administrasi adalah pekerjaan terencana yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bekerjasama untuk mencapai tujuan atas dasar efektif, efisien, dan rasional. Menurut Dimock (dalam Anggara, 2012:134) mengemukakan definisi administrasi negara sebagai berikut : Administrasi negara merupakan bagian dari administrasi umum yang mempunyai lapangan lebih luas, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana lembaga lembaga mulai dari satu keluarga hingga perserikatan bangsa-bangsa disusun, digerakkan, dan dikemudikan.

Pengertian Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Secara sederhana implementasi dapat juga diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Browne dan Wildavsky (dalam Nurdin dan Usman, 2004:70) mengemukakan bahwa implementasi adalah suatu perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Van Meter dan Van Horn (dalam Wahab, 2006:65) mengatakan bahwa implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintahan atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Sebenarnya kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan atau norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan tertentu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Itu artinya bahwa setiap kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan implementasi yang sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan.

Menurut Hanifah Harsono dalam bukunya yang berjudul *Implementasi Kebijakan dan Politik* mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi yaitu : “Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program”.

Sedangkan Menurut Guntur Setiawan dalam bukunya yang berjudul *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan* mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan, “Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif”.

Implementasi merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya (Jones,1987) Leo Agustino dalam *Bukunya Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (2008:139) mengatakan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Dari beberapa defenisi tersebut diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu pertama adanya tujuan atau sasaran kebijakan, kedua adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan, dan yang ketiga adalah adanya hasil kegiatan.

Teori/Konsep Keluarga Berencana

Konsep keluarga berencana telah banyak dikemukakan para ahli. Menurut Hartanto (2004), Keluarga berencana adalah tindakan yang membantu individu atau pasangan suami istri untuk mendapatkan objek tertentu, yaitu : (1) menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, (2) mendapat kelahiran yang diinginkan, (3) mengatur interval diantara kehamilan, (4) menentukan jumlah anak dalam keluarga.

Sesuai dengan (BKKBN,2015) keluarga berencana adalah upaya untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas melalui promosi, perlindungan, dan bantuan dalam mewujudkan hak-hak reproduksi serta penyelenggaraan pelayanan, pengaturan dan dukungan yang diperlukan untuk membentuk keluarga dengan usia kawin yang ideal, mengatur jumlah, jarak, dan usia ideal melahirkan anak, mengatur kehamilan dan membina ketahanan serta kesejahteraan anak.

Selanjutnya Mukti (2000) menyatakan keluarga berencana adalah sebagai upaya ikhtiar untuk memberikan jaminan kesehatan, untuk sang anak maupun ibu, jaminan pendidikan merupakan bekal yang sangat berharga untuk kehidupan kelak dalam masyarakat, untuk memenuhi kesejahteraan dan kemakmuran keluarga lahir dan batin.

Selanjutnya Marjo (1998) mengatakan keluarga berencana adalah menjarangkan/ mengatur kehamilan dengan harapan perhitungan keseimbangan ekonomi, baik untuk pendidikan anak-anak dan lain-lain, dan hal ini dilakukan dengan menggunakan alat kontrasepsi. Selanjutnya Hartanto (2004) mengemukakan keluarga berencana adalah tindakan yang membantu individu atau pasangan suami istri untuk mendapatkan objek tertentu, yaitu: (1) menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, (2) mendapatkan kelahiran yang diinginkan, (3) mengatur interval diantara kehamilan, (4) menentukan jumlah anak dalam keluarga.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009, keluarga berencana adalah suatu program masyarakat yang menghimpun dan mengajak segenap potensi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam melembagakan dan membudayakan Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera dalam rangka meningkatkan mutu sumber daya manusia melalui pendewasaan usia perkawinan (PUP), pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga kecil bahagia dan sejahtera.

Adapun tujuan gerakan keluarga berencana secara umum adalah mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera melalui pengendalian kelahiran dan pertumbuhan penduduk. Menurut Aputra (2004) Tujuan Gerakan Keluarga Berencana (KB) adalah menurunkan tingkat kelahiran dengan mengikut sertakan seluruh lapisan potensi yang ada, mengembangkan usaha-usaha untuk membantu meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak, memperpanjang harapan hidup, menurunkan tingkat kematian bayi dan anak balita serta memperkecil kematian ibu karena resiko kehamilan dan persalinan, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap masalah kependudukan yang menjurus ke arah penerimaan, penghayatan dan pengalaman NKKBS sebagai cara hidup yang layak dan bertanggung jawab.

Sasaran KB adalah orang yang dapat berperan sebagai objek maupun subjek dalam gerakan keluarga berencana terutama pasangan usia subur yang berusia 15-49 tahun. Menurut Handayani (2010) sasaran KB yaitu sasaran langsung dan tidak langsung. Sasaran langsung yakni pasang usia subur yang bertujuan untuk menurunkan tingkat kelahiran dengan cara penggunaan kontrasepsi secara berkelanjutan, dan sasaran tidak langsung yakni pelaksana dan pengelola KB dengan cara menurunkan tingkat kelahiran melalui pendekatan kebijaksanaan kependudukan terpadu dalam rangka mencapai keluarga yang berkualitas, keluarga sejahtera. Strategi Penerapan Pelaksanaan Gerakan Keluarga Berencana Pelaksanaan gerakan keluarga berencana di Indonesia adalah untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera yang merupakan sumber daya manusia dengan cara mengendalikan kelahiran. Dalam rangka menjamin terkendalinya pertumbuhan penduduk Indonesia dengan mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera dan diharapkan akan membentuk pola tingkah laku kelahiran tiap-tiap keluarga yang menguntungkan bagi pengendalian jumlah kelahiran masyarakat bangsa Indonesia pada umumnya.

Menumbuhkan, menggerakkan, membimbing dan mengembangkan berbagai institusi, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat di dalam pengelolaan dan pelaksanaan gerakan KB Nasional yang mengarah kepada pelembagaan dan pembudayaan Norma Keluarga Kecil yang

Bahagia dan Sejahtera (NKKBS). Strategi penerapan pelaksanaan gerakan keluarga berencana antara lain :

- Mengkoordinasikan berbagai kegiatan serta menggerakkan dan mengarahkan semua potensi jajaran gerakan KB Nasional, baik dilingkungan intern BKKBN maupun extern BKKBN, untuk memperkuat dan memanfaatkan peranan instansi masyarakat agar menjadi instansi yang dinamis dan mandiri.
 - Merangsang dan mengarahkan peran serta dan tanggung jawab masyarakat di dalam pengelolaan dan pelaksanaan gerakan KB Nasional melalui wadah instansi masyarakat.
 - Meningkatkan upaya memperkuat lini lapangan khususnya pada tingkat kecamatan kebawah dengan meningkatkan kemampuan manajemen operasional bagi para pengelola program.
 - Meningkatkan pelaksanaan Gerakan KB Nasional dengan memperkuat pelayanan bersama masyarakat, dengan ditingkatkan partisipasi masyarakat lewat jalur instansi masyarakat yang ada untuk menjaga wahana dan jaringan pelayanan pelaksanaan KB Nasional sampai pada tingkat keluarga.
 - Meningkatkan koordinasi dengan semua unit pelaksanaan baik pemerintah, swasta maupun masyarakat dalam proses pembangunan masyarakat yang ber-NKKBS sebagai upaya mempercepat proses terpenuhinya kebutuhan masyarakat.
 - Mengembangkan sistem pembinaan instansi masyarakat dan instansi formal (sosialisasi) sebagai dasar bagi pelaksanaan pembudayaan NKKBS, yang dilakukan secara berjenjang sampai pada tingkat administrasi pemerintah yang terendah dan diarahkan untuk dapat beradaptasi setiap kegiatan program dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat.
 - Meningkatkan pembinaan kesempatan-kesempatan dalam hal alih peran program oleh masyarakat.
 - Memantapkan koordinasi pelaksanaan gerakan KB Nasional pada setiap tingkatan wilayah yang diarahkan dalam upaya untuk memantapkan instansi masyarakat sebagai pelaksana kegiatan gerakan KB, sehingga instansi dapat mengambil alih pengelolaan gerakan KB pada lingkungannya dan memantapkan instansi masyarakat sebagai wadah untuk memproses pembudayaan NKKBS.
- Ada beberapa faktor penyebab ketidak berhasilan gerakan keluarga berencana dipengaruhi oleh faktor, umur pasangan usia subur (15-49 tahun), pendidikan (SD, SMP, SMA, Perguruan Tinggi), pekerjaan (pertanian dan non pertanian), budaya (faktor keturunan, banyak anak banyak rejeki, anak sebagai faktor ekonomi, kualitas pelayanan akseptor KB (pilihan metode kontrasepsi, kualitas pemberian informasi, kemampuan teknis petugas, hubungan interpersonal, mekanisme pelayanan ketetapan konstelasi pelayanan akseptor KB, strategi penerapan pelaksanaan gerakan keluarga berencana). (BKKBN, 2016).

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Survey, dengan tingkat eksplanasi Deskriptif serta menggunakan analisis data Kualitatif. Menurut Sugiyono penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisa data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Pengumpulan data dapat dilakukan dari berbagai setting, sumber dan cara. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, studi dokumentasi dan gabungan dari ketiganya atau triangulasi. (Sugiyono, 2012:62-63).

Data mentah yang akan diperoleh dari hasil observasi, wawancara semi terstruktur (semistructure interview) dan bersifat terbuka (open ended), studi dokumentasi, materi audio dan visual dan triangulasi. Analisis data akan dilakukan dengan model dari Miles dan Huberman. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Menurut model ini secara umum proses analisis data mencakup reduksi data (data Reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing/verification).

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan memperoleh gambaran secara mendalam mengenai implementasi

Program Keluarga Berencana (KB) di Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti memahami proses pelaksanaan program berdasarkan pengalaman, pandangan, dan informasi yang diperoleh dari pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan Program KB.

Lokasi penelitian ditetapkan di Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa Kecamatan Pangean merupakan salah satu wilayah yang melaksanakan Program KB sebagai bagian dari kebijakan pemerintah dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Penelitian dilakukan dengan memperhatikan kondisi pelaksanaan program, keterlibatan pelaksana, partisipasi masyarakat, serta berbagai kendala yang muncul dalam proses implementasinya.

Dalam menganalisis implementasi Program KB, penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Teori tersebut digunakan sebagai landasan untuk melihat keberhasilan implementasi kebijakan melalui beberapa aspek, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana, disposisi atau sikap pelaksana, serta kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Keenam aspek tersebut menjadi dasar dalam mengidentifikasi faktor pendukung maupun penghambat pelaksanaan Program KB di Kecamatan Pangean.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan informan yang dianggap memiliki pengetahuan dan keterlibatan dalam pelaksanaan Program KB. Informan penelitian dapat meliputi petugas atau penyuluh KB, aparaturnya, tenaga kesehatan, kader KB, serta masyarakat sebagai penerima manfaat program. Pemilihan informan dilakukan secara purposive, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Data sekunder diperoleh melalui dokumen, laporan kegiatan, data kependudukan, dokumentasi pelaksanaan program, serta sumber tertulis lain yang berkaitan dengan Program KB.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk mengamati kondisi dan pelaksanaan kegiatan KB di lapangan. Wawancara dilakukan secara mendalam untuk memperoleh informasi mengenai proses pelaksanaan program, kendala, respons masyarakat, serta upaya yang dilakukan oleh pelaksana. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat hasil observasi dan wawancara.

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber dan teknik, yaitu membandingkan informasi dari berbagai informan serta mencocokkan hasil wawancara dengan observasi dan dokumentasi. Melalui tahapan tersebut, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang objektif mengenai implementasi Program Keluarga Berencana di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi..

4. Hasil Dan Pembahasan

Dalam penelitian ini penulis mengambil dan menggunakan 12 Informan sebagai informan yang memberikan informasi yang jelas dalam memberikan penambahan informasi dalam penelitian ini sehingga total informan adalah 23 orang. Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap 12 informan maka diketahui beberapa identitas informan sebagai berikut :

Responden Berdasarkan Tingkat Usia

Secara teoritis faktor usia akan mempengaruhi seseorang dalam mengambil sebuah keputusan. Demikian pula dalam menentukan pilihan, tingkat usia memberi pengaruh. Semakin tinggi usia, maka keputusan yang akan diambil akan semakin baik karena tingkat umur akan memberi pengaruh terhadap kematangan seseorang dalam berfikir, Tingkat usia informan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah :

Responden Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah	Persentase
1	20-29	2	16,66
2	30-39	7	58,33

3	40-49	3	25
4	≥50	0	0
Jumlah		12	100

Sumber : Data Penelitian Tahun 2020

Data pada tabel ini menunjukkan jumlah informan yang berusia 20-29 tahun yaitu sebanyak 2 orang (16,66%) dari jumlah keseluruhan dan 7 orang yang berusia antara 30-39 tahun (58,33%) dari jumlah keseluruhan, dan 3 orang yang berusia 40-49 tahun (25%) ,serta 0 orang yang berusia diatas 50 Tahun (0%). Dengan demikian dapat diketahui bahwa responden atau informan terbanyak berusia 30 sampai 39 tahun.

Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Adapun informan dalam penelitian ini dibedakan menjadi 2 jenis kelamin yang akan dijelaskan pada tabel IV. 7 berikut ini :

Klasifikasi Informan Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Informan	Persentase (%)
1	Laki-Laki	1	8,33
2	Perempuan	11	91,66
Jumlah		12	100

Sumber : Data Penelitian Tahun 2020

Data pada tabel IV. 7 dapat diketahui bahwa dari 12 orang yang menjadi informan, 1 orang (8,33%) dari jumlah keseluruhan berjenis kelamin laki-laki, 11 orang (91,66%) berjenis kelamin perempuan, sehingga dapat dinyatakan bahwa jumlah informan berjenis kelamin perempuan lebih banyak dari jumlah informan berjenis kelamin Laki-laki.

Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan informan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Klasifikasi Informan Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Informan	Persentase (%)
1	SD	2	16,66
2	SLTP	2	16,66
3	SLTA	5	41,66
4	S1	3	25
5	S2	0	0
Jumlah		12	100

Sumber : Data PenelitianTahun 2020

Dari Tabel di atas menunjukkan dapat diketahui bahwa jumlah informan yang mempunyai pendidikan SD sederajat yaitu sebanyak 2 orang informan atau (16,66%) dari jumlah keseluruhan, dan 2 orang informan yang berpendidikan SLTP sederajat atau (16,66%) dari jumlah keseluruhan dan 5 orang yang berpendidikan SLTA sederajat atau (41,66%) dari jumlah keseluruhan dan 3 orang atau (25%) yang berpendidikan S1dan serta 0 orang responden atau (0%) dari jumlah keseluruhan. Dari data tabel di atas dapat dilihat dan disimpulkan bahwa informan atau responden yang paling banyak berdasarkan tingkat pendidikannya adalah informan yang mempunyai pendidikan SLTA sederajat yaitu 41,66% dari jumlah keseluruhan.

Indikator Penelitian Tentang Implementasi Program Keluarga Berencana di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi

Indikator Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu indikator dalam mengukur suatu keberhasilan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam penelitian ini peneliti terutama akan membahas tentang indikator komunikasi. implementasi suatu kebijakan berjalan sesuai yang direncanakan, maka diperlukan komunikasi yang efektif. Ada empat indikator dalam mengukur keberhasilan komunikasi, yaitu : transmisi, kejelasan, dan konsisten.

Berikut Hasil Wawancara dengan koordinator KB Kecamatan Pangean yaitu Rizke Eras Rianti, A.Md, Keb :

“Untuk memberikan kejelasan dan penjelasan kami telah melakukan dan memberikan informasi tersebut kepada masyarakat secara umum dan telah kami sosialisasikan juga secara merata”. (Wawancara, 15 September 2020).

Berikut Hasil Wawancara dengan masyarakat yaitu Ibu Tuti mengatakan bahwa :

“Untuk informasi terkait program keluarga berencana tersebut sudah jelas dan telah disampaikan kepada seluruh masyarakat terutama ibu-ibu desa tentang pentingnya pelaksanaan program keluarga berencana tersebut”. (Wawancara, 15 September 2020).

Berikutnya adalah pertanyaan kedua dari indikator komunikasi yaitu Apakah pemerintah telah memberikan sosialisasi yang jelas kepada keluarga dan masyarakat setempat tentang pentingnya pelaksanaan program keluarga berencana tersebut ?

Berikut Hasil Wawancara dengan Bapak Camat Pangean yaitu Bapak Mahvien Trikon Putra :

“Kami bersama dengan Tim dan juga kepala desa telah memberikan sosialisasi terkait program keluarga berencana tersebut dan telah kami sampaikan kepada seluruh masyarakat elemen terkait dan juga kepada seluruh kepala desa yang ada di Kecamatan Pangean”. (Wawancara, 15 September 2020).

Dari hasil wawancara tersebut, yang mana pihak pemerintah telah menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat dan juga kepada seluruh elemen terkait serta kepada seluruh kepala desa yang ada di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

Berikut Hasil Wawancara dengan koordinator KB Kecamatan Pangean yaitu Rizke Eras Rianti, A.Md, Keb :

“Untuk memberikan sosialisasi kejelasan dan penjelasan kami telah melakukan dan memberikan informasi tersebut kepada masyarakat secara umum dan telah kami sosialisasikan juga secara merata dan hal sosialisasi ini kami laksanakan secara rutin agar masyarakat dapat melaksanakannya dengan baik”. (Wawancara, 15 September 2020).

Berikut Hasil Wawancara masyarakat desa Sungai Langsat yaitu Rahma mengatakan bahwa :

“Ya, memang sudah ada sosialisasi yang telah disampaikan oleh pemerintah dan petugas KB Kecamatan Pangean melalui kepala desa beberapa waktu yang lalu, namun hal ini tak semua warga mengetahuinya karena kebanyakan warga tak memperdulikan hal itu”. (Wawancara, 15 September 2020).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan terkait komunikasi terhadap informasi program keluarga berencana tersebut, yang mana pemerintah melalui beberapa kepala desa dan juga media sosial telah disampaikan kepada seluruh masyarakat terutama keluarga yang mempunyai anak lebih dari dua orang di desa masing-masing di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi beberapa waktu yang lalu.

Indikator Sumber Daya

Selanjutnya untuk mengukur atau melihat terimplementasinya suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau swasta adalah dengan menggunakan tolak ukur atau indikator sumber daya.

Sumber daya merupakan indikator yang sangat penting untuk melihat terlaksananya atau terimplementasinya suatu kebijakan yang telah dirancang sebelumnya. Yang dimaksud dengan sumber daya disini adalah suatu kekuatan atau suatu kemampuan yang dimiliki oleh unsur dari pelaksana dari kebijakan tersebut, yang mana orang-orang atau para aktor dari implementasi tersebut sangat berperan penting untuk menciptakan keterlaksanaan dari sebuah implementasi kebijakan yang telah dibuat tersebut.

Untuk melihat atau terlaksananya indikator dari sumberdaya tersebut, disini peneliti memberikan tiga pertanyaan yang akan diberikan kepada informan, yang mana semua unsur dari informan tersebut akan dilampirkan kutipan hasil wawancaranya.

Apakah petugas atau pegawai pemerintah telah melaksanakan pekerjaan dengan baik terkait pelaksanaan program Keluarga Berencan tersebut ?

Berikut Hasil Wawancara dengan Bapak Camat Pangean yaitu Bapak Mahvien Trikon Putra :

“Pemerintah telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan penuh dengan rasa tanggung jawab yang tinggi serta telah menjalin kerja sama dengan semua pihak terkait dalam penyelenggaraan dan sosialisasi program keluarga berencana tersebut terutama di desa-desa yang berada di Kecamatan Pangean itu sendiri”. (Wawancara, 15 September 2020).

Dari hasil wawancara tersebut, yang mana pihak pemerintah telah melaksanakan semua pekerjaan dengan baik dan penuh tanggung jawab serta menjalin kerja sama dengan kepada seluruh elemen terkait serta kepada seluruh kepala desa yang ada di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.

Indikator Disposisi

Selanjutnya untuk mengukur atau melihat terimplementasinya suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau swasta adalah dengan menggunakan tolak ukur atau indikator disposisi. Disposisi merupakan indikator yang sangat penting untuk melihat terlaksananya atau terimplementasinya suatu kebijakan yang telah dirancang sebelumnya. Yang dimaksud dengan disposisi disini adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mengangkat atau menunjuk suatu petugas atau pelaksana dari kebijakan itu sendiri, karena kegiatan ini berkaitan langsung dengan kepentingan orang banyak.

Untuk melihat atau terlaksananya indikator dari disposisi tersebut, disini peneliti memberikan dua pertanyaan yang akan diberikan kepada informan, yang mana semua unsur dari informan tersebut akan dilampirkan kutipan hasil wawancaranya.

Apakah pemerintah atau petugas telah transfaran dalam penetapan dan penyampaian informasi tentang Program KB tersebut ?

Berikut Hasil Wawancara dengan Bapak Camat Pangean yaitu Bapak Mahvien Trikon Putra :

“Pihak pemerintah sudah dengan terbuka dalam penyampaian program keluarga berencana tersebut, karena semua keluarga dan masyarakat tersebut sudah berdasarkan hasil musyawarah dari setiap desa yang ada di Kecamatan Pangean dan dilanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi agar program keluarga berencana tersebut dapat berjalan dengan baik khusus di Kecamatan Pangean”. (Wawancara, 15 September 2020).

Dari hasil wawancara tersebut, yang mana pihak pemerintah telah melaksanakan semua pekerjaan dengan transparan dan menjalin kerja sama dengan kepada seluruh elemen terkait serta kepada seluruh kepala desa yang ada di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi terkait pelaksanaan kegiatan program keluarga berencana di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi pada umumnya.

Indikator Struktur Birokrasi

Selanjutnya untuk mengukur atau melihat terimplementasinya suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau swasta adalah dengan menggunakan tolak ukur atau indikator Struktur

Birokrasi. Struktur Birokrasi merupakan indikator yang sangat penting untuk melihat terlaksananya atau terimplementasinya suatu kebijakan yang telah dirancang sebelumnya. Yang dimaksud dengan Struktur birokrasi adalah struktur kelembagaan pelaksanaan program. Ada dua unsur dalam hal ini, yaitu prosedur rutin atau standar prosedur operasi dan *fragmentasi* (pemecahan/pembagian untuk beberapa bagian kekuasaan).

Untuk melihat atau terlaksananya indikator dari struktur birokrasi tersebut, disini peneliti memberikan dua pertanyaan yang akan diberikan kepada informan, yang mana semua unsur dari informan tersebut akan dilampirkan kutipan hasil wawancaranya.

Apakah pegawai atau petugas pemerintah telah menunjukkan sikap yang baik kepada masyarakat terhadap Program Keluarga Berencana tersebut ?

Berikut Hasil Wawancara dengan Bapak Camat Pangean yaitu Bapak Mahvien Trikon Putra :

“Petugas atau pegawai dalam menyampaikan dan mensosialisasikan kegiatan program keluarga berencana ini tentu sudah memberikan sikap dan etika yang baik kepada keluarga dan masyarakat secara umum terutama ibu-ibu tersebut, karena sebelum mereka melaksanakan tugasnya, mereka terlebih dahulu diberikan pelatihan dan pendidikan yang baik”. (Wawancara, 15 september 2020).

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan yang didapat melalui metode wawancara, observasi, dokumntasi serta analisa peneliti di lapangan, maka hasil penelitiannya adalah Implementasi Program Keluarga Berencana Di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi sudah terimplementasi dengan Cukup baik sebagaimana mestinya.

Saran

Dari kesimpulan tersebut, maka dapat diberikan beberapa saran yang tujuannya adalah untuk kebaikan dan kemajuan semata, adapun sarannya adalah sebagai berikut, kepada Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dan khususnya Pemerintah Kecamatan Pangean diharapkan adanya perhatian yang lebih serius dalam penyaluran dan pengelolaan Program Program Keluarga Berencana Di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi tersebut agar lebih baik lagi.

References

- Barthos, Basir, 2005, Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta, Bumi Aksara.
Hasibuan, Malayu SP 2005, Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta, Bumi Aksara.
Hamalik, Oemar, 2001, Pengembangan Sumber Daya Manusia Manajemen Pelatihan Ketenagakerjaan Pendekatan Terpadu, Jakarta, PT. Bumi Aksara.
Husein Umar, 1999, Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Masri Singarimbun dan Sofian Efendi (editor), 2008, Metode Penelitian Survei, LP3ES Indonesia, Jakarta.
Nurcholis, Hanif, 2011, Pemerintahan Desa, Jakarta, Erlangga.
Sugiyono, 2003, Metode Penelitian Administrasi, Alfabeta, Bandung.
Rachmawati, Ike Kusdyah, 2008, Manajemen Sumber Daya Manusia, Yogyakarta, Andi.
Saudjana, 2000, Program Pendidikan, Bandung, Falah Production.
Syafri, Wirman, 2012, Studi Tentang Administrasi Publik, Jakarta, Erlangga.
Saydam, Gouzali, 2000, Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta, Djembatan.
Siagian, Sondang P, 2009, Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta, PT. Bumi Aksara.
Sugiyono, 2012, Memahami Penelitian Kualitatif, CV. Alfabeta, Bandung.
Sugiyono, 2014, Metode Penelitian Administrasi, Penerbit Alfabeta. Bandung.